

ABSTRAK

Kejahatan yang terjadi di Indonesia seakan tidak bisa diminimalisir oleh penegak hukum, salah satunya adalah kejahatan seksual yang acapkali terjadi kepada anak dan mencuatkan ide sanksi kebiri yang kemudian disahkan oleh Presiden Jokowi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikenal dengan Perppu Kebiri. Namun dengan hadirnya Perppu kebiri ini menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya di lapangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar penolakan atau alasan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelaksanaan sanksi kebiri kimia oleh dokter dan untuk mengkaji dan menganalisis sanksi kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis normatif kualitatif. Teknik pengumpulan yaitu menggunakan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia dan internet.

Hasil penelitian skripsi ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, IDI beralasan bahwa dokter dilarang untuk mempergunakan pengetahuannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. IDI tidak bisa dan tidak diizinkan menjadi eksekutor karena melanggar sumpah profesi dan kode etik profesi. Penolakan tersebut didasarkan atas Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki). Apabila dikaji dengan teori tujuan pemidanaan, nampak bahwa pidana kebiri dikenakan semata-mata hanya sebagai sarana untuk pembalasan.

Di Indonesia sanksi kebiri dibingkai *retributive*, tidak melindungi korban juga tidak melindungi pelaku. Sebaliknya ketika kebiri dilakukan dengan prinsip *rehabilitative* atau dengan kesadaran pelaku/sukarela dikebiri maka menghasilkan efek jera yang dapat terukur

Kata Kunci : Sanksi kebiri, Kode etik kedokteran, Tujuan pemidanaan

ABSTRACT

Crimes that occur in Indonesia can not be minimized by law enforcers, one of which is a sexual crime that often occurs to children and raises the idea of castration sanctions which was later passed by President Jokowi Perppu Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Children, known as Perppu Kebiri. But with the presence of the castration Perppu raises the pros and cons in its implementation in the field.

The purpose of this study was to determine the basis for rejection or the reasons for the Indonesian Doctors Association (IDI) related to the implementation of chemical castration sanctions by doctors. Second, Act Number 23 of 2002 concerning Child Protection in accordance with the purpose of punishment.

Thesis writing uses normative juridical research methods and qualitative normative analysis methods. Collection techniques are using legislation, books, scientific works, encyclopedias and the internet.

The results of this thesis research of the Indonesian Doctors Association (IDI) refused to become executors of castration punishment as an additional punishment for perpetrators of sexual crimes in children, IDI reasoned that doctors are prohibited from using their knowledge for things that are contrary to humanity. IDI cannot and is not permitted to become an executor because it violates a professional oath and professional code of ethics. The rejection was based on the Fatwa of the Ethics and Medical Ethics Council (MKEK) No. 1 of 2016 concerning Chemical Castration and also based on the Doctor Oath and the Indonesian Medical Ethics Code (Kodeki). When examined with the theory of criminal purpose, it appears that the castrated criminal is imposed solely as a means of retaliation.

In Indonesia castration sanctions are framed retributive, neither protecting victims nor protecting perpetrators. Conversely, when castration is carried out with rehabilitative principles or with the awareness of the perpetrators / voluntary castrated it will produce a measurable deterrent effect.

Keywords: castration sanctions, medical code of ethics, the purpose of punishment.